



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-214/PB/2022 15 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II
2022 dan Strategi Pencapaian IKPA Optimal T.A. 2022

- Yth. 1. Wakil Kepala Kepolisian RI;
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
3. Para Sekretaris Kementerian Koordinator;
4. Deputi Bidang Administrasi Kemensetkab; dan
5. Para Sekretaris Jenderal/Utama Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka mewujudkan belanja berkualitas melalui penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas nilai IKPA Belanja K/L periode Triwulan II 2022 yang secara nasional telah tercapai sebesar 90,56. Hal ini mencerminkan tata kelola pelaksanaan anggaran tetap terjaga dengan baik di tengah kebijakan akselerasi belanja serta pencapaian *output* yang optimal. Hasil penilaian IKPA Triwulan II 2022 pada K/L Saudara adalah sebagaimana terlampir.
2. Penilaian IKPA dimaksud dilakukan secara tersistem melalui Aplikasi *Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* pada 3 aspek dan 8 indikator kinerja, yaitu:
 - a. Aspek kualitas perencanaan anggaran, yang terdiri atas indikator kinerja Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA;
 - b. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas indikator kinerja Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM; dan
 - c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator kinerja Capaian *Output*.
3. Selanjutnya, pada Triwulan III dan IV T.A. 2022, kiranya K/L Saudara dapat lebih akseleratif dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran dengan tetap menjaga tata kelola melalui langkah-langkah pengawalan 8 indikator kinerja pada IKPA tersebut di atas, terutama dengan:
 - a. Mengendalikan revisi anggaran secara sangat selektif;
 - b. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan penyerapan anggaran untuk sisa alokasi belanja sesuai target;
 - c. Menyampaikan data kontrak, pertanggungjawaban UP-TUP, dan penyelesaian tagihan secara tepat waktu dan akurat;
 - d. Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran;
 - e. Memperhatikan konsistensi antara jadwal kegiatan dan realisasi belanja dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada DIPA; serta
 - f. Melaporkan dan mengakselerasi capaian *output* sesuai target dan tepat waktu.

4. Selain itu, dalam rangka mendukung simplifikasi dan efisiensi pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) yang terkoneksi secara langsung dengan *marketplace*/pasar UMKM dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam satu ekosistem yang terintegrasi, kiranya K/L Saudara juga dapat lebih meningkatkan transaksi dengan memanfaatkan fasilitas *Digital Payment-Marketplace* (Digipay) yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sebagai bahan evaluasi sampai dengan bulan Juli 2022, jumlah dan nominal transaksi Digipay pada K/L Saudara adalah sebagaimana terlampir.
5. Apabila terdapat kendala teknis di lapangan dalam upaya pencapaian nilai IKPA yang optimal, maka Satker dalam lingkup K/L Saudara agar:
 - a. Memanfaatkan layanan konsultasi *helpdesk* HAI-DJPb (<https://hai.kemenkeu.go.id>); dan
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja setempat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Direktur Jenderal Anggaran
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-214/PB/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

DAFTAR PEJABAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

- 1 Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 2 Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
- 3 Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
- 4 Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
- 5 Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
- 6 Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
- 7 Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 8 Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
- 9 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
- 10 Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- 11 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
- 12 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
- 13 Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
- 14 Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 15 Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
- 16 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 17 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- 18 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- 19 Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
- 20 Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
- 21 Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 22 Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 23 Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 24 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- 25 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 26 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 27 Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 28 Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 29 Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 30 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 31 Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 32 Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
- 33 Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- 34 Sekretaris Utama Dewan Ketahanan Nasional
- 35 Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
- 36 Sekretaris Jenderal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- 37 Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- 38 Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 39 Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 40 Kepala Pusat Keuangan Kepolisian RI
- 41 Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 42 Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
- 43 Sekretaris Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



- 44 Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
- 45 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 46 Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 47 Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 48 Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 49 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
- 50 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
- 51 Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 52 Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
- 53 Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
- 54 Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 55 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
- 56 Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
- 57 Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
- 58 Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
- 59 Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
- 60 Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- 61 Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
- 62 Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
- 63 Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
- 64 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 65 Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 66 Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 67 Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- 68 Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 69 Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
- 70 Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- 71 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 72 Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
- 73 Sekretaris Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum
- 74 Sekretaris Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- 75 Sekretaris Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- 76 Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
- 77 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 78 Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 79 Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 80 Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-214/PB/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

**HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BELANJA K/L
TRIWULAN II TAHUN 2022**

No.	Kode KL	Nama KL	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	99,97	92,52	98,56	99,52	99,64	98,98	100,00	99,31	98,60
2	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	100,00	84,54	99,14	98,50	89,47	95,89	100,00	98,62	96,32
3	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	100,00	87,39	93,46	96,32	98,01	99,31	100,00	96,25	95,86
4	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	100,00	78,10	93,85	95,13	97,62	96,19	100,00	93,61	93,88
5	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	99,85	86,63	86,60	95,70	98,50	96,21	100,00	91,78	92,95
6	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	99,91	80,07	77,28	97,44	97,82	98,34	100,00	98,17	92,36
7	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	100,00	76,93	77,25	98,99	100,00	98,60	100,00	96,96	92,14
8	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	100,00	89,42	73,69	98,08	97,42	97,29	100,00	96,07	91,98
9	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	100,00	92,99	79,97	100,00	71,63	95,28	100,00	99,56	91,87
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	100,00	73,74	82,73	97,25	97,96	98,00	100,00	93,21	91,54
11	054	BADAN PUSAT STATISTIK	99,95	67,83	81,22	97,86	99,21	98,27	100,00	95,89	91,53
12	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	100,00	50,82	87,78	99,56	100,00	98,97	100,00	94,92	91,22
13	005	MAHKAMAH AGUNG	100,00	66,33	86,19	94,10	96,03	97,34	100,00	94,23	91,18
14	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	100,00	86,50	75,89	100,00	87,50	93,27	100,00	97,07	91,17
15	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	100,00	87,73	78,42	99,28	100,00	86,41	100,00	92,51	91,15

No.	Kode KL	Nama KL	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
16	114	SEKRETARIAT KABINET	100,00	85,44	78,26	100,00	100,00	87,37	100,00	92,46	91,05
17	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	100,00	87,47	74,30	98,06	98,01	98,68	100,00	91,71	91,01
18	027	KEMENTERIAN SOSIAL	100,00	52,18	100,00	94,56	91,63	96,20	100,00	89,41	90,81
19	025	KEMENTERIAN AGAMA	100,00	56,15	88,12	95,77	96,14	97,06	100,00	93,51	90,51
20	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	100,00	64,88	75,77	96,32	96,49	97,76	100,00	99,26	90,51
21	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	100,00	71,93	89,19	79,46	92,97	98,81	100,00	93,10	90,43
22	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	100,00	82,70	80,84	93,65	94,74	81,41	100,00	95,17	90,21
23	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	100,00	56,22	74,35	100,00	100,00	96,10	100,00	100,00	90,10
24	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	100,00	74,49	73,85	96,49	98,25	97,52	100,00	94,53	90,08
25	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	100,00	80,82	70,10	95,42	91,07	91,89	100,00	100,00	89,94
26	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	99,96	78,68	75,18	93,59	96,19	98,08	100,00	92,73	89,87
27	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	99,95	69,65	81,81	93,72	97,90	98,51	100,00	89,31	89,66
28	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	100,00	80,98	70,89	91,76	98,88	98,88	100,00	93,32	89,56
29	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	98,21	81,32	86,27	85,50	90,57	95,02	100,00	88,48	89,44
30	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	100,00	89,29	60,10	97,73	98,95	94,31	100,00	96,26	89,11
31	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	100,00	65,45	73,81	94,55	98,73	93,00	100,00	94,50	88,56
32	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	100,00	75,97	68,42	97,80	97,32	93,72	100,00	93,25	88,48
33	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	100,00	76,38	75,98	96,37	96,17	95,37	100,00	85,80	88,08
34	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	68,11	76,88	96,08	96,87	95,13	100,00	87,09	87,77
35	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	100,00	64,81	62,77	100,00	90,48	96,69	100,00	100,00	87,75
36	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	100,00	64,34	63,71	98,11	96,29	97,95	100,00	93,04	86,67
37	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	100,00	54,53	75,23	95,88	96,35	95,28	100,00	89,62	86,65

No.	Kode KL	Nama KL	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
38	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	100,00	72,82	69,11	95,85	92,96	92,80	100,00	89,46	86,63
39	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	100,00	68,38	66,22	96,21	96,60	96,14	100,00	90,07	86,49
40	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	100,00	51,53	68,64	94,77	93,51	94,82	100,00	97,11	86,47
41	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	100,00	85,63	80,42	0,00	0,00	64,64	100,00	92,22	86,46
42	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	100,00	53,92	72,96	96,11	96,35	98,14	100,00	88,98	86,29
43	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	100,00	72,34	87,99	77,70	62,86	80,33	100,00	97,18	86,22
44	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	100,00	63,00	77,14	92,61	92,50	93,01	100,00	86,24	86,10
45	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	99,93	73,28	66,91	95,19	97,75	96,49	100,00	85,59	86,04
46	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	93,75	60,31	77,41	92,29	88,67	88,74	100,00	92,70	86,03
47	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100,00	78,81	54,32	97,94	94,55	96,21	100,00	93,43	85,97
48	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	100,00	67,43	60,02	88,76	93,98	100,00	100,00	95,70	85,94
49	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	100,00	58,45	85,74	94,44	94,70	96,73	100,00	77,15	85,87
50	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	100,00	49,99	73,20	100,00	100,00	97,34	100,00	84,03	85,38
51	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	92,86	58,21	71,57	100,00	100,00	97,38	100,00	84,04	85,17
52	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	100,00	66,74	98,36	68,92	70,91	93,13	100,00	81,10	84,92
53	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	100,00	53,77	67,37	89,41	99,05	100,00	100,00	87,62	84,60
54	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	100,00	72,34	81,03	84,11	76,47	90,37	100,00	83,26	84,35
55	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	100,00	68,40	73,71	88,70	97,30	64,07	100,00	90,23	84,15
56	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100,00	62,70	61,38	94,29	97,69	95,00	100,00	87,58	84,14
57	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH	100,00	78,01	53,81	88,43	97,50	98,83	100,00	88,30	84,12

No.	Kode KL	Nama KL	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
58	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	99,70	62,03	52,37	95,78	97,73	96,31	100,00	93,41	83,98
59	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	100,00	50,75	47,42	100,00	100,00	99,95	100,00	95,63	83,46
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	100,00	68,76	74,10	93,50	63,64	98,41	100,00	83,65	83,16
61	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	100,00	63,80	61,74	91,95	96,08	91,50	100,00	85,48	83,05
62	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	100,00	53,25	69,58	98,56	99,52	93,54	100,00	77,97	82,90
63	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BAREKRAF	100,00	58,53	65,98	95,34	94,71	95,75	100,00	80,99	82,88
64	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	100,00	48,79	66,71	95,47	93,86	93,63	100,00	84,27	82,58
65	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	100,00	58,97	70,48	93,27	95,72	94,89	100,00	76,51	82,51
66	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	100,00	62,55	55,02	93,31	94,66	95,74	100,00	85,91	82,11
67	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	100,00	51,11	60,63	98,23	96,04	95,39	100,00	83,53	82,09
68	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	100,00	61,35	63,93	97,10	90,54	94,80	100,00	78,75	81,85
69	100	KOMISI YUDISIAL RI	100,00	42,17	55,88	85,43	86,36	88,85	100,00	99,97	81,45
70	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	100,00	43,83	50,39	94,98	89,77	98,75	100,00	94,28	81,38
71	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100,00	68,73	36,35	88,32	92,37	95,05	100,00	96,26	80,78
72	119	BADAN KEAMANAN LAUT	100,00	60,71	36,49	94,81	100,00	96,71	100,00	92,75	80,71
73	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	100,00	70,27	41,88	94,52	97,00	95,91	100,00	84,91	80,37
74	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	100,00	63,17	52,14	97,96	80,00	97,19	100,00	82,84	79,97
75	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	100,00	58,67	53,54	97,51	93,56	94,86	100,00	78,03	79,67
76	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00	64,08	41,79	94,23	89,41	94,60	100,00	86,15	79,13

No.	Kode KL	Nama KL	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
77	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	100,00	46,11	78,42	74,56	55,56	91,19	100,00	81,93	77,91
78	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	100,00	44,78	35,70	76,84	68,47	83,81	100,00	100,00	74,53
79	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	100,00	44,38	32,28	92,05	91,30	95,04	100,00	76,80	72,93
80	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	100,00	41,54	33,46	52,53	82,61	81,59	100,00	79,63	67,43
RATA-RATA			99,80	67,35	70,39	92,38	91,71	94,26	100,00	90,53	86,48

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto



LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-214/PB/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

**PERKEMBANGAN TRANSAKSI DIGIPAY KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN JULI 2022 (NILAI DALAM RIBU RUPIAH)**

No	Kode K/L	Nama K/L	2019		2020		2021		2022		Total Jumlah Transaksi 2019 s.d. Juli 2022	Total Nilai Transaksi 2019 s.d. Juli 2022
			Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi		
1	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	186	368.832,02	2.336	5.379.483,80	5.867	12.794.360,16	4.040	9.315.499,67	12.429	27.858.175,64
2	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA					455	1.438.548,32	956	1.938.442,13	1.411	3.376.990,44
3	025	KEMENTERIAN AGAMA					602	1.254.879,62	1.417	2.011.117,81	2.019	3.265.997,43
4	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN					171	967.680,28	322	869.528,56	493	1.837.208,83
5	054	BADAN PUSAT STATISTIK					514	660.559,31	447	767.105,25	961	1.427.664,56
6	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI					191	364.422,05	492	952.749,99	683	1.317.172,04
7	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					40	128.405,31	611	921.539,68	651	1.049.944,99
8	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					175	286.438,43	278	607.985,08	453	894.423,51
9	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI					157	246.851,73	320	566.541,26	477	813.392,99
10	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN					27	214.164,55	46	491.808,32	73	705.972,87
11	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					93	302.413,58	105	202.490,27	198	504.903,85
12	024	KEMENTERIAN KESEHATAN					76	120.083,13	156	351.789,11	232	471.872,23
13	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL					50	35.362,65	240	269.157,00	290	304.519,65
14	005	MAHKAMAH AGUNG					131	107.359,89	214	191.081,29	345	298.441,18
15	027	KEMENTERIAN SOSIAL					11	235.479,44	4	37.164,80	15	272.644,24
16	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA					1	40.000,00	29	157.607,13	30	197.607,13
17	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA							86	184.478,84	86	184.478,84
18	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					113	28.487,50	33	145.743,77	146	174.231,27
19	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN					14	100.611,59	19	46.845,18	33	147.456,77

No	Kode K/L	Nama K/L	2019		2020		2021		2022		Total Jumlah Transaksi 2019 s.d. Juli 2022	Total Nilai Transaksi 2019 s.d. Juli 2022
			Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi		
20	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					3	10.874,77	77	106.542,62	80	117.417,39
21	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA					76	48.194,40	84	57.360,50	160	105.554,90
22	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM					68	38.035,00	156	61.408,93	224	99.443,93
23	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL							6	94.646,90	6	94.646,90
24	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI			4	11.255,00	8	50.788,00	5	30.013,00	17	92.056,00
25	018	KEMENTERIAN PERTANIAN					20	16.774,69	197	74.279,70	217	91.054,39
26	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA					2	29.105,00	2	51.767,07	4	80.872,07
27	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA					18	29.869,00	36	48.574,55	54	78.443,55
28	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA					19	6.690,00	29	67.999,65	48	74.689,65
29	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN					6	1.924,00	45	61.135,41	51	63.059,41
30	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA					1	19.155,30	6	43.120,50	7	62.275,80
31	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI							36	51.591,67	36	51.591,67
32	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR							10	41.484,97	10	41.484,97
33	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN							7	36.309,69	7	36.309,69
34	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3	32.264,55	3	32.264,55
35	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN					7	27.750,00			7	27.750,00
36	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN							2	19.754,40	2	19.754,40
37	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL							1	10.035,00	1	10.035,00
38	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							5	6.052,50	5	6.052,50
39	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL							32	5.667,36	32	5.667,36
40	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN					1	515,00	5	5.059,00	6	5.574,00
41	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					7	2.232,00	27	924,00	34	3.156,00
42	104	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA					13	924,50	5	442,50	18	1.367,00
43	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI							1	1.044,00	1	1.044,00
44	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN					1	330,00	2	597,00	3	927,00
45	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN							3	645,00	3	645,00

No	Kode K/L	Nama K/L	2019		2020		2021		2022		Total Jumlah Transaksi 2019 s.d. Juli 2022	Total Nilai Transaksi 2019 s.d. Juli 2022
			Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi		
46	100	KOMISI YUDISIAL RI					2	313,00			2	313,00
47	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BAREKRAF					1	130,00			1	130,00
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL							1	88,00	1	88,00
Grand Total			186	368.832,02	2.340	5.390.738,80	8.941	19.609.712,19	10.598	20.937.483,58	22.065	46.306.766,59

Keterangan:

*) sampai dengan Juli 2022

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

